

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Amos Neolaka, Kesadaran Lingkungan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003).

Bambang Widjojanto, BeWe Menggugat: Kriminalisasi membungkam suara rakyat, (Malang: Intrans publishing, 2016).

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta: 2013).

Dameis Surya. A dan Candra Abdillah, Modul Metode Penelitian Lapangan, (Pamulang : UNPAM PRESS, 2019).

Djarmiko, Margono, Wahyono, Pendayagunaan Industrial Waste Management (Kajian hukum Lingkungan Indonesia), (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2000).

Islamy, Prinsip – Prinsip Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bina Aksara, 2003).

Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019).

Joni, H., Hukum Lingkungan Kehutanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Mansyur A. Effendy, Kapita Selekta Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I Umum, (Bandung: Binacipta 1981).

Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Djambatan, 2001).

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip – Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Siahaan, N.H.T, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004).

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000).

Sri Soemantri, Bunga Rampai Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992).

Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Suteki dan Galang Taufan, Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2008).

JURNAL:

Laurensius Arliman, S, Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia, Jurnal Lex Librum, Volume V, No. 1, Desember 2018.

Arnim Scheidel and others, 'Environmental Conflicts and Defenders: A Global Overview', Global Environmental Change, 63.June (2020).

Handayani., Achmadi., & Apsari, "Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8 No. 1, 2021.

I. Bries, "Environmental Defenders Under Threat: Global Lessons from the Colombian Amazon," no. September, 2022.

Ika Febriana dan Yensy Ina, "Revisi UU Minerba Sebagai Tonggak Baru Pertumbuhan Ekonomi Bangsa", Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral, Vol. 2 No. 1, 2021.

J. Knox, "Environmental Human Rights Defenders. A global crisis," *Policy Brief, Univers. Rights Gr.*, no. February, 2017.

Nani Indrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia, Jurnal Media Juris, Vol 5 No 1, 2022.

Sembiring, Raynaldo, Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 1 No.1, 2014.

Sitabuana, T. H., & Setiawan, H, "Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Era Hukum Vol. 19 No. 1, 2021.

Syahrani Syahrani dan Muhammad Alfitras Tavares, “Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup Di Era Pemulihan Ekonomi Nasional”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.7 No.1, Desember 2020.

United Nation. UN Environment Policy on Promoting Greater Protection for Environmental Defenders. 2017.

Wahyu Nugroho, “Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang – Undang Minerba”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Vol.27 No.3, September 2020.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

SKRIPSI:

Prabu Dhivan Husaini, “Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan Hidup”, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020).

INTERNET:

Advokat Konstitusi “Menilik Aneka Kontroversi dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba.” [Menilik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba – Advokat Konstitusi](#), (diakses, Maret 03, 2023).

BandungBergerak.id, “Judicial Review UU Minerba, Mahkamah Konstitusi Seharusnya Berpihak kepada Rakyat”, <https://bandungbergerak.id/article/detail/2917/judicial-review-uu-minerba-mahkamah-konstitusi-seharusnya-berpihak-kepada-rakyat> , (diakses, Maret 19, 2023)

Daulat Hijau, “Ahli Nyatakan Pasal 162 UU Minerba tidak Bisa Dikenakan Kepada Trio Alasbuluh”, <https://fnksda.or.id/ahli-nyatakan-pasal-162-uu-minerba-tidak-bisa-dikenakan-kepada-trio-alasbuluh/>, (diakses, Maret 19, 2023).

Dewan Hak Asasi Manusia sesi ke-40, “Mengakui kontribusi pembela hak asasi manusia terhadap penikmatan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan”, <https://www.right-docs.org/doc/a-hrc-res-40-11/>, (diakses, Maret 05, 2023).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: RDPU”, 13 Juli 2009.

Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, ‘Putusan’, 2018.

FORUM-ASIA dan KontraS, “Menolak Bungkam: Analisa Bersama terkait Situasi Pembela Hak Asasi Manusia”, <https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/09/Analisa-HRD-Regional-Situasi-Asia-dan-Indonesia.pdf>, (diakses, Oktober 23, 2022).

Greenpeaceid, “Hilangnya Hak dan Perlindungan Masyarakat Lewat UU Minerba”, <https://www.instagram.com/p/CZYrzVChK7I/>, (diakses, Maret 15, 2023).

Jaringan Advokasi Tambang, “Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat”, <https://www.jatam.org/putusan-sidang-rakyat-uu-minerba-harus-batal->

[demi-hukum-untuk-keselamatan-dan-kedaulatan-rakyat](#), (diakses, Juli 16, 2022).

Kontan.co.id, “Pembahasan Revisi UU Minerba Dimulai Awal Pekan Depan”, [Pembahasan revisi UU Minerba dimulai awal pekan depan - Page all \(kontan.co.id\)](#), (diakses, 12 Maret, 2023).

Nur Aini, “Hukum Lingkungan: Pengertian – Ruang Lingkup dan Asasnya.” [https://haloedukasi.com/hukum-lingkungan#Pengertian Hukum Lingkungan](https://haloedukasi.com/hukum-lingkungan#Pengertian_Hukum_Lingkungan), (diakses, November 20, 2022).

Nurmala Fitri, “Pejuang Lingkungan”, (Kompas, 25 Agustus 2012).

Rapiuddin Hamarung, Perlindungan Terhadap Peran Serta Masyarakat (Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP Suit), in Henri Subagiyo (ed), Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Edisi Pertama) (1st edn, ICEL 2014).

Rully M. Ramli, “Revisi UU Minerba, Ini Beberapa Pasal yang Tuai Polemik”, (Kompas, 13 Mei 2020).

WALHI, “Tolak Pengesahan RUU Revisi UU Minerba 12 Mei 2020”, [Tolak Pengesahan RUU Revisi UU Minerba12 Mei 2020 | WALHI](#), (diakses, Maret 13, 2023).

WALHI, “Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup Terus Berlanjut di Rezim Nawacita”, <https://www.walhi.or.id/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup-terus-berlanjut-di-rezim-nawa-cita>, (diakses, Oktober 23, 2022).

WAWANCARA:

Ferdian Ade Putra Prayitno, Wawancara, LindungiHutan, (Semarang: 27 Februari, 2023).

Taibah Istiqamah, Wawancara, Partai Hijau, (Semarang: 22 Mei, 2023).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : Nota Dinas
Lamp. : ---
Hal : Penggantian Judul Penulisan Hukum

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
u.b. Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Hukum UNDIP
di Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa selaku Pembimbing I / Pembimbing II dan setelah melakukan beberapa kali evaluasi serta analisa terhadap penyusunan materi Penulisan Hukum mahasiswa tersebut dibawah ini, kami mengajukan permohonan penggantian judul menjadi sebagaimana berikut:

Nama : Suci Atini Ngarti
NIM : 11000119130622
Nomor HP : 0898-6553-065
Bidang Minat : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.

Judul Awal : Implementasi Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Judul Revisi : Implementasi Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup dalam
Kasus Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara

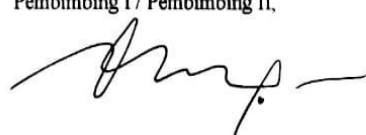
Kami berharap, perubahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan *up-date* data dalam Sistem Informasi Akademik (SIMAK) Fakultas Hukum Undip, dalam rangka tertib administrasi dan menghindari kesalahan dikemudian hari.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Menyetujui:
Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
NIP. 198905212014042001

Semarang, 24 Mei 2023
Pembimbing I / Pembimbing II,


Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.
NIP. 195911161987031002

Tembusan:
- Mahasiswa yang bersangkutan